

# ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Akhmad Kurniawan<sup>1</sup> , Dyah Mutiarin<sup>2</sup>, Muhammad  
Noor Cahyadi Eko Saputro<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

 [aa.kurniawan.isip21@mail.umy.ac.id](mailto:aa.kurniawan.isip21@mail.umy.ac.id)

## ***Abstract***

*This research aims to evaluate Balikpapan's financial health by analyzing the Realization Report of the City of Balikpapan APBD, specifically the ratio of independence, efficiency, and effectiveness of Local Own Revenue (PAD). The Budget Realization Report covers the fiscal years 2017 through 2021. Data analysis used a descriptive statistical approach. The results suggest that Balikpapan City's independence ratio is low and exhibits a constructive connection pattern between the 2017 and 2021 fiscal years, averaging just 29.99%. With an average success rate of 110.98% of the budgeted amount, PAD in Balikpapan City is very effective for the 2017-2021 fiscal year. The PAD efficiency ratio for the fiscal years 2017-2021 demonstrates the inefficient financial performance of Balikpapan City, with an annual average of 65.61%.*

**Keywords:** *The ratio of Independence, Ratio of Efficiency, Ratio of Effectiveness, Report of Actualization, Local Own Revenue*

# ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan Balikpapan dengan menganalisis Laporan Realisasi APBD Kota Balikpapan, khususnya rasio otonomi, efisiensi, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan Realisasi Anggaran mencakup tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021. Analisis data menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Balikpapan tergolong rendah dan menunjukkan pola hubungan yang konstruktif antara tahun anggaran 2017 dan 2021, rata-rata hanya sebesar 29,99%. Dengan tingkat keberhasilan rata-rata 110,98% dari jumlah yang dianggarkan, PAD Kota Balikpapan sangat efektif untuk tahun anggaran 2017-2021. Rasio efisiensi PAD tahun anggaran 2017-2021 menunjukkan belum efisiennya kinerja keuangan Kota Balikpapan, dengan rata-rata tahunan sebesar 65,61%.

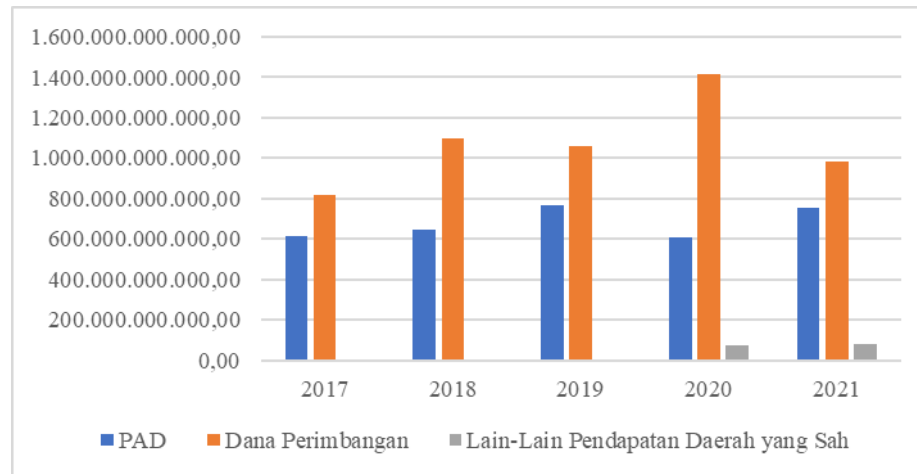
**Kata kunci:** Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Laporan Aktualisasi, Pendapatan Asli Daerah

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan buah era reformasi yang dapat dipanen oleh Pemerintah Daerah, karena memberikan hak kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom. Menanggapi aspirasi masyarakat untuk pemerintahan yang lebih demokratis, kedua undang-undang ini disahkan dan merupakan titik awal tumbuhnya desentralisasi. Desentralisasi memerlukan pengalihan beberapa tugas dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah [1]. Pelimpahan tanggung jawab anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga merupakan akibat dari pelaksanaan desentralisasi. [2]. Desentralisasi fiskal selanjutnya disebut sebagai pengalihan kewenangan fiskal ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara formal diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan finansial untuk mengejar pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, mereka harus didorong untuk kreatif dan inventif dalam pembangunan daerah untuk memberikan peluang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga akan tercermin dari kinerja keuangan yang kuat [3]. Sementara itu, salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah analisis rasio keuangan yang dihitung dan diterapkan pada APBD. [4]. Sebagaimana dituangkan dalam APBD, menganalisis rasio keuangan suatu metode untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola uang mereka. [5]. Pemerintah daerah diharapkan lebih memiliki kemandirian keuangan daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan pendapatan dan analisis pendapatan daerah [6].

Kota industri Balikpapan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Dengan produksi minyak sebesar 86 juta barel per tahun, Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" [7]. Pertumbuhan sektor minyak telah mengubah Balikpapan menjadi kota metropolis industri [8]. Di Balikpapan, potensi produksi karet masih kuat. Oleh karena itu, pembangunan pabrik karet tetap menjadi prioritas utama Dinas Perkebunan Kota Balikpapan. Selain itu, tersedianya pasar yang mampu menyerap hasil karet Balikpapan mendukung tingginya potensi karet di kawasan ini. Pada tahun 2021, Perhimpunan Bangsa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menganugerahkan kepada Balikpapan sebagai Environmentally Sustainable Cities (ESC) [9]. Ketersediaan potensi dan insentif daerah tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Kota Balikpapan tahun anggaran 2017-2021, tergantung pada sumber pendapatannya, ditunjukkan grafik pada gambar 1.



**Gambar 1.** Pendapatan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

**Sumber:** Olah data DJPK Kementerian Keuangan, 2023

Gambar 1 hasil grafik menunjukkan bahwa dana perimbangan biasanya memberikan kontribusi sebesar 72% dari pendapatan daerah, pendapatan asli daerah biasanya memberikan kontribusi sebesar 19,85%, dan pendapatan daerah lainnya yang sah biasanya memberikan kontribusi sebesar 8,15%. [10]. Dalam mencapai otonomi daerah, pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan perpajakan dan pengeluaran. Namun, dikarenakan PAD yang rendah, banyak daerah harus terus bergantung pada pendanaan pusat. Potensi ekonomi daerah untuk pertumbuhan PAD masih cukup besar menurut angka yang ada, namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga fenomena ini penting untuk diwaspadai.

Oleh karena itu, komponen moneter daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti adalah derajat otonominya sebagai unit pemerintahan kabupaten/kota. Rasio kemandirian daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan pajak dan biaya untuk mendukung operasi mereka sendiri. Isu lain yang tidak boleh diabaikan adalah keberhasilan ekonomi daerah otonom sebagai barometer kemajuan daerah menuju peningkatan pendapatan per kapita [11]. Menurut Halim jika dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya, rasio efektivitas mengungkapkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mewujudkan pendapatan asli daerah yang direncanakan [12]. Indikator rasio efektivitas PAD saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD, karena meskipun rasio efektivitasnya sangat baik, jika pengeluaran untuk mencapai tujuan sangat tinggi, maka pengumpulan PAD tidak efisien. Akibatnya, penting juga untuk menghitung rasio efisiensi PAD. Menurut Mardiasmo, rasio antara output dan input, atau realisasi belanja dan pendapatan daerah, digunakan untuk mengukur efisiensi [13]. Berdasarkan informasi yang diberikan, kami dapat merumuskan masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji PAD Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2017-2021 ditinjau dari kemandirian keuangan daerah, efisiensi PAD, dan efektifitas PAD.

## 2. Metode

Kajian ini difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Balikpapan. Website Pemerintah Kota Balikpapan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan yang menyediakan akses informasi terkait LRA. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan systematic literature review. Adapun penelitian kualitatif deskriptif adalah metode pilihan untuk analisis data penelitian ini. Tujuan dari metodologi yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data dan memberikan penjelasan lengkap tentang data tersebut yang memiliki keterhubungan dengan topik yang sedang dibahas dan menyusunnya secara sistematis [14]. Artikel ini juga menggunakan Informasi kuantitatif yang digunakan sebagai argumentasi dasar yang digunakan untuk menganalisis kualitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan. Menurut Teguh Informasi kuantitatif adalah data yang dapat direpresentasikan secara numerik, seperti hasil survei atau pencarian online [15]. Data yang digunakan adalah data time series dan data sekunder. Berbagai data yang dikumpulkan dalam artikel ini kemudian dianalisis dengan cara mengklasifikasikan, mengidentifikasi, menginterpretasi seluruh temuan data numerik yang telah diperoleh. Dalam mendapatkan hasil kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Balikpapan maka artikel ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut.

### 2.1 Analisis Rasio Kemandirian

Analisis rasio independensi terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Realisasi PAD Kota Balikpapan dan total pendapatan dari LRA tahun anggaran 2017-2021 harus dikumpulkan, diidentifikasi, dan ditabulasikan.
- b. Rasio kemandirian setiap tahun ditentukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Berdasarkan rasio kemandirian yang ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini untuk melihat hubungan dan derajat kemampuan daerah, pola keterkaitan dengan kemampuan daerah (finansial) dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Dinamika Interaksi dan Kemampuan Daerah

Indipenden (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

**Sumber:** Halim [16]

- d. Periksa rasio independensi yang dihitung untuk tren.

### 2.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas PAD dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mendapatkan angka anggaran LRA Kota Balikpapan dan angka realisasi PAD tahun anggaran 2017–2021, kemudian mengidentifikasinya dan menyusunnya menjadi spreadsheet.

- b. Untuk setiap tahun fiskal, hitung rasio efektivitas PAD menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- c. Lihat tabel 2 untuk mengetahui seberapa efisien PAD.

**Tabel 2.** Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi [17]

- d. Analisis rasio efektivitas PAD yang ditentukan.

### 2.3 Analisis Rasio Efisiensi PAD

Untuk menghitung rasio efisiensi, seseorang harus melakukan hal berikut:

- a. Menghitung jumlah seluruh PAD yang diperoleh dan seluruh PAD yang terealisasi di Kota Balikpapan selama tahun anggaran 2017-2021 dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasikan data LRA yang relevan.
- b. Berdasarkan setiap tahun anggaran, hitung rasio efisiensi PAD. Menurut Mahmudi [17], rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Menentukan nilai efisiensi PAD untuk realisasi APBD dengan melihat Tabel 3.

**Tabel 3.** Efisiensi Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efisien	< 10
Efisien	10 - 20
Cukup Efisien	21 - 30
Kurang Efisien	31 - 40
Tidak Efisien	> 40

Sumber: Mahmudi [17]

- d. Analisis rasio efisiensi PAD yang dihitung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kemandirian Kota Balikpapan

Rasio otonomi daerah dihitung dengan membagi realisasi PAD dengan total realisasi pendapatan daerah. PAD dan total pendapatan Kota Balikpapan tercantum pada Tabel 4 untuk tahun anggaran 2017–2021.

#### 3.1.1 Data Penelitian

**Tabel 4.** PAD dan Total Pendapatan Kota Balikpapan TA 2017-2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan
2017	612.250.040.990,01	1.873.966.991.358,01
2018	646.868.407.485,10	2.230.736.621.233,10
2019	764.087.241.241,05	2.469.528.492.671,23
2020	609.057.640.903,42	2.515.508.487.764,14
2021	755.062.500.914,79	2.278.259.847.189,69

**Sumber:** BPKAD Kota Balikpapan, Data diolah (2023)

### 3.1.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Balikpapan

Tabel 5 merangkum data yang disajikan sejauh ini tentang tingkat otonomi, sumber daya keuangan, dan pola hubungan antara Kota Balikpapan dan pemerintah pusat.

**Tabel 5.** Kemandirian Kota Balikpapan TA 2017-2021

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2017	32,67%	Rendah	Konstruktif
2018	29%	Rendah	Konstruktif
2019	30,94%	Rendah	Konstruktif
2020	24,21%	Rendah	Konstruktif
2021	33,14%	Rendah	Konstruktif
<b>Rasio Rata-Rata</b>		<b>29, 99%</b>	

**Sumber:** Data diolah (2023)

### 3.1.3 Analisis Kemandirian Kota Balikpapan

Lihat seberapa besar otonomi keuangan Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2017-2021 di bawah ini:

- Rasio kemandirian Kota Balikpapan tahun 2017 sebesar 32,67%, artinya PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 32,67% atau Rp612.250.049.901 terhadap total pendapatan. Pada tahun tersebut, derajat kemandirian Kota Balikpapan masih relatif rendah yang menunjukkan adanya pola hubungan konstruktif dalam kerjasama dengan pemerintah pusat. Sebesar 88,56% atau Rp 817.394.319.469 dari total pendapatan daerah merupakan kontribusi dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.
- Pada tahun 2018, rasio kemandirian kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 3,67% dari tahun sebelumnya menjadi 29%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan Dana Perimbangan sebesar Rp1.096.230.492.809 lebih besar dari kenaikan PAD yang hanya sebesar Rp646.868.605.485,10. Meski menunjukkan pola hubungan konstruktif dengan pemerintah pusat, tingkat otonomi Kota Balikpapan masih relatif rendah.
- Pada tahun 2019, rasio kemandirian Kota Balikpapan kembali tumbuh sebesar 1,94% dari tahun 2018 menjadi 30,94%. PAD meningkat 15,65% atau Rp 764.087.241,1,05 dibandingkan tahun sebelumnya. Pos penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan, yaitu sebesar Rp565.236.192.479,07. Dibandingkan tahun sebelumnya, pos penerimaan pajak daerah ini memiliki varian

16% atau Rp 181.780.337.762. Namun, kemandirian Kota Balikpapan masih relatif rendah, menunjukkan kecenderungan ikatan konstruktif dengan pemerintah pusat.

- d) Pada tahun 2020, persentase kemandirian Kota Balikpapan kembali turun 6,73% menjadi 24,21%. Penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan Dana Perimbangan sebesar 34,25% atau Rp 356.477.707.401 dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, PAD mengalami penurunan sebesar 18,18% dari tahun sebelumnya atau Rp 155.029.600.337,63. Karena tradisi kerjasama konstruktif dengan pemerintah pusat, tingkat otonomi Kota Balikpapan masih relatif rendah meskipun terjadi penurunan PAD dan peningkatan Dana Perimbangan yang cukup besar.
- e) Pada tahun 2021, rasio kemandirian Kota Balikpapan berada pada rasio 33,14% yang mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 8,93% dari tahun sebelumnya. Tahun ini menandai tingkat kemandirian Kota Balikpapan yang maksimal selama lima tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021. Kenaikan ini merupakan hasil dari penurunan Dana Perimbangan sebesar 25,64% atau Rp 437.269.825.557, dan peningkatan PAD sebesar 17,43% atau Rp148.982.550.161,37. Meski ada kecenderungan kerjasama konstruktif dengan pemerintah pusat, derajat kebebasan Kota Balikpapan masih relatif rendah.

### 3.2 Efektivitas PAD Kota Balikpapan

Rasio efektivitas membandingkan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah dengan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi tujuan tersebut, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang diharapkan [16].

#### 3.2.1 Data Penelitian

Tabel 6 menjabarkan tujuan dan capaian pembangunan kawasan rencana (PAD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2017-2021.

**Tabel 6.** Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan TA 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2017	612.250.040.990,01	568.575.283.786,00
2018	646.868.407.485,10	678.500.000.000,00
2019	764.087.241.241,05	688.424.448.700,00
2020	609.057.640.903,42	471.519.353.613,00
2021	755.062.500.914,79	675.712.743.600,00

**Sumber:** BKAD Kota Balikpapan, Data diolah (2023)

#### 3.2.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Balikpapan

Angka rasio efektivitas PAD dan interpretasinya untuk Kota Balikpapan ditunjukkan pada Tabel 7 berdasarkan data tujuan dan pelaksanaan PAD yang telah disebutkan sebelumnya.

**Tabel 7.** Efektivitas Keuangan Kota Balikpapan TA 2017-2021

Tahun	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2017	107,68%	Sangat Efektif
2018	95,34%	Cukup Efektif

2019	110,99%	Sangat Efektif
2020	129,16%	Sangat Efektif
2021	111,74%	Sangat Efektif
<b>Rasio Rata-Rata</b>		<b>110,98%</b>

**Sumber:** Data diolah (2023)

### 3.2.3 Analisis Efektivitas PAD Kota Balikpapan

Pada tahun anggaran 2017-2021, efektivitas PAD Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kota Balikpapan pada tahun 2017 memiliki rasio efisiensi sebesar 107,68%. Berdasarkan rasio efektivitas PAD lebih dari 100%, kinerja perekonomian Kota Balikpapan dinilai sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang dicapai pada tahun 2017 melebihi target yang ditargetkan. Realisasi PAD tahun 2017 adalah Rp612.250.040.990,01 sedangkan targetnya adalah Rp575.575.283.786,00.
- b) Pada tahun 2018, rasio efektivitas Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 12,34% menjadi sebesar 95,34% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan rasio efektivitas PAD, kinerja keuangan Kota Balikpapan tahun 2018 tergolong cukup efektif. Pelaksanaan PAD Kota Balikpapan belum melampaui tujuan PAD yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
- c) Rasio efektivitas Kota Balikpapan tahun 2019 sebesar 110,99%, meningkat 15,65% dibandingkan tahun 2018. Kota Balikpapan berhasil mencapai PAD sebesar Rp75.662.792.544 lebih dari target yang ditetapkan. Tahun ini, berdasarkan efektivitas PAD, kinerja keuangan Kota Balikpapan dikategorikan sangat efektif karena rasionya mencapai lebih dari 100%.
- d) Rasio efektivitas Kota Balikpapan tahun 2020 sebesar 129,16% naik 18,17% dari tahun 2019. Kota Balikpapan mampu mencapai PAD lebih dari Rp. 137.538.287.290,42 dari target yang telah ditetapkan, maka kinerja keuangan Kota Balikpapan tahun 2020 dinilai sangat efektif berdasarkan rasio efektivitas.
- e) Rasio efektivitas Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 111,74%, mengalami penurunan sebesar 17,42% dari tahun 2020. Kota Balikpapan mampu mencapai PAD lebih dari Rp79.349.757.314,79 dari target yang ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Kota Balikpapan tahun 2021 masih dikategorikan sangat efektif berdasarkan rasio efektivitas.

### 3.3 Efisiensi PAD Kota Balikpapan

Jika kotamadya mampu mencapai tujuannya sambil mengeluarkan uang sesedikit mungkin, dapat dikatakan telah dilakukan secara efisien.

#### 3.3.1 Data Penelitian

Rasio Efisiensi ditetapkan dengan membandingkan Biaya yang Dikeluarkan untuk Mengumpulkan PAD dengan Penerimaan yang Direalisasikan dari PAD dalam satu bulan. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD (biaya perolehan PAD) merupakan pengeluaran yang biasa dikeluarkan untuk menjalankan kewajiban dan kegiatan pemerintah, termasuk pengeluaran tenaga kerja dan barang. Untuk tahun anggaran 2017



sampai dengan tahun 2021, tabel berikut menunjukkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Kota Balikpapan untuk membiayai perolehan PAD dan merealisasikan PAD. Adapun jika dilihat dari rentang lima tahun tersebut realisasi penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 2,5 Triliun lebih.

**Tabel 8.** Biaya Pemerolehan dan Realisasi PAD Kota Balikpapan TA 2017-2021

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi Penerimaan
2017	1.383.541.790.165,00	1.873.966.991.358,01
2018	1.573.083.163.488,00	2.230.736.621.233,10
2019	900.712.337.308,00	2.469.528.492.671,23
2020	1.628.718.130.007,00	2.515.508.487.764,14
2021	1.879.384.514.411,00	2.278.259.847.189,69

**Sumber:** BKAD Kota Balikpapan, Data diolah (2023)

### 3.3.2 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kota Balikpapan

Nilai rasio efisiensi PAD pada Tabel 9 dan interpretasinya untuk Kota Balikpapan didasarkan pada data biaya perolehan dan realisasi pendapatan yang dilaporkan sebelumnya.

**Tabel 9.** Efisiensi PAD Kota Balikpapan tahun 2017 - 2021

Tahun	Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
2017	73,83%	Tidak Efisien
2018	70,52%	Tidak Efisien
2019	36,47%	Kurang Efisien
2020	64,75%	Tidak Efisien
2021	82,49%	Tidak Efisien
<b>Rasio Rata-Rata</b>		<b>65,61%</b>

**Sumber:** Data diolah (2023)

### 3.3.3 Analisis Efisiensi PAD Kota Balikpapan

Bagian berikut memaparkan tingkat efisiensi PAD di Kota Balikpapan selama tahun anggaran 2017-2021.

- a) Rasio efisiensi PAD Kota Balikpapan tahun 2017 sebesar 73,83%. Kinerja keuangan Kota Balikpapan tahun ini berdasarkan efisiensi PAD tergolong tidak efisien karena rasio efisiensi PAD lebih tinggi dari 40%. Persentase ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan tidak efisien dalam mendapatkan PAD dan gagal menekan pengeluaran. Pada tahun 2017, biaya pemungutan PAD adalah sebesar Rp1.383.541.790.165 atau 73,83% dari total realisasi pendapatan sebesar Rp1.873.966.991.358.
- b) Pada tahun 2018, rasio efisiensi PAD Kota Balikpapan sebesar 70,52%, turun 3,31% dari tahun 2017. Tahun ini, berdasarkan efisiensi PAD, kinerja keuangan Kota Balikpapan dinilai tidak efisien karena rasio efisiensi PAD melebihi 40%. Persentase ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan tidak efisien dalam mendapatkan PAD dan gagal menekan pengeluaran. Pada tahun 2018, biaya pengumpulan PAD sebesar Rp1.573.083.163.488 atau 70,52% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp2.230.736.621.233,10.
- c) Pada tahun 2019, rasio efisiensi PAD Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 34,05% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan upaya

- pemerintah untuk meminimalisir pengeluaran. Kinerja keuangan Kota Balikpapan berdasarkan efisiensi PAD tahun ini tergolong kurang efisien karena rasio efisiensi PAD antara 31% sampai dengan 40%. Rasio ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan kurang efisien dalam memperoleh PAD dan mengurangi pengeluaran. Pada tahun 2019, pungutan pemungutan PAD adalah sebesar Rp900.712.337.308 atau 36,47% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp2.469.528.492.671,33.
- d) Pada tahun 2020, PAD Kota Balikpapan memiliki rasio efisiensi sebesar 64,75%, meningkat 28,28% dibanding tahun 2019. Tahun ini, kinerja keuangan Kota Balikpapan dinilai tidak efisien berdasarkan rasio efisiensi PAD yaitu lebih dari 40%. Persentase ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan tidak efisien dalam mendapatkan PAD dan gagal menekan pengeluaran. Pada tahun 2020, beban pemungutan PAD sebesar Rp1.628.718.130.007 atau 64,75% dari total realisasi penerimaan sebesar Rp2.515.508.487.764,14.
- e) Terjadi peningkatan rasio efisiensi PAD Kota Balikpapan sebesar 17,74% dari tahun 2020 ke 2021, sehingga total menjadi 82,49% pada tahun 2021. Akibat rasio efisiensi PAD yang lebih besar dari 40%, kinerja fiskal Kota Balikpapan tahun ini dinilai tidak efisien. Persentase ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan tidak efisien dalam memperoleh PAD dan belum berhasil menekan pengeluaran. Beban pemungutan PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.879.384.514.411,00 yang setara dengan 82,49% dari total realisasi penerimaan sebesar Rp2.278.259.847.189,69.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tingkat kemandirian keuangan Kota Balikpapan meningkat setiap tahunnya, dengan rasio kemandirian keuangan lima tahun terakhir rata-rata 29,99%, menunjukkan bahwa pola hubungan pusat-daerah masih konstruktif dengan pemerintah pusat. Memainkan peran yang lebih dominan daripada independensi pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (SDA), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan kontribusi pemerintah yang paling signifikan.
- 2) Berdasarkan data yang dianalisis, tingkat keberhasilan PAD Kota Balikpapan terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, namun masih jauh dari target pada tahun 2018. Semua penerimaan daerah telah berjalan sangat efektif pada tahun 2017, 2019, dan 2021, dengan persentase efektivitas di atas 100%. Target pencapaian PAD tahun 2018 turun menjadi 95,34% karena banyak faktor hasil laba perusahaan yang tidak sesuai dengan pencapaian tolak ukur yang telah ditetapkan.
- 3) Hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan bahwa tahun anggaran 2017-2021 ditandai dengan tingkat efisiensi yang lebih rendah, dengan tingkat pencapaian efisiensi rata-rata dan rata-rata tahunan sebesar 65,61%. Tren rasio yang lebih besar dari 40% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menghimpun PAD semakin memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa produksi yang optimal tidak bebas biaya bagi pemerintah daerah. Skala prioritas daerah harus diperhatikan dalam

melakukan pemotongan anggaran dan pengalokasian dana di antara berbagai pos anggaran jika ingin kinerja keuangan daerah sesuai dengan konsep value for money yang ekonomis, efektif, dan efisien.

## Referensi

- [1] A. M. Christia dan B. Ispriyarso, "DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH di INDONESIA," *Law Reform*, vol. 15, no. 1, hal. 149, 2019, doi: 10.14710/lr.v15i1.23360.
- [2] S. Amaliah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah," Jakarta, 2021. [Daring]. Tersedia pada: <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- [3] D. A. D. Nasution, "Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan," *J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 3, hal. 149–162, 2019.
- [4] A. Halim, D. Rahayu, dan Muzdalifah, "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DAN 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2019)," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 8, hal. 248–253, 2022, doi: 2548-1398.
- [5] A. T. Sulisty, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 1, hal. 43–59, 2018, doi: 10.33105/itrev.v3i1.22.
- [6] A. Labi, "ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2013 - 2015 ALFRED," *J. Akunt. Bisnis dan Ekon.*, vol. 5, hal. 1355–1370, 2019.
- [7] S. Amelia, "Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan menimbulkan permasalahan lingkungan," *Pus. Publ. Pendidik. IPS - FKIP ULM*, hal. 1–12, 2022.
- [8] A. R. Pratama, "Dari Kebutuhan Menjadi Ancaman: Ironi Penduduk Pendetang di Kota Balikpapan 1970 – 2013," *Lembaran Seji.*, vol. 15, no. 2, hal. 144, 2020, doi: 10.22146/lembaran-sejarah.59532.
- [9] B. Irawan, "Balikpapan dan Bontang Kota Paling Bersih di Asia Tenggara," *korankaltim.com*, 2021. <https://korankaltim.com/read/headline/47630/balikpapan-dan-bontang-kota-paling-bersih-di-asia-tenggara?amp=1> (diakses 5 Januari 2023).
- [10] djpk.kemenkeu.go.id, "Portal Data SIKD," *kemenkeu.go.id*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Januari 2023).
- [11] M. H. As-Siddiq, "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan," Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- [12] H. Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Distrib. - J. Manag. Bus.*, vol. 7, no. 1, hal. 81–92, 2019, doi: 10.29303/distribusi.v7i1.67.
- [13] V. S. E. Cicilia, S. Murni, dan D. M. Engka, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara," *J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 17, no. 2, hal. 1–12, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- [14] H. Umar, *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- [15] D. Kartika dan I. C. Kusuma, "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi," *J. Akunida*, vol. 1, no. 2, hal. 23–33, 2015.
- [16] A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- [17] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)